



**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS SPASIAL
ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

***THE ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND SPATIAL DISPARITIES
BETWEEN DISTRICT OF SITUBONDO REGENCY***

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)
dan mencapai gelar Magister**

Oleh:

ANNA KUSUMA

NIM. 090820201031

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan menurut Paul P. Streeten diartikan sebagai upaya untuk memberantas penyakit sosial masyarakat, yang antara lain meliputi: kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, permukiman kumuh dan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2000:126). Definisi ini harus dimaknai secara luas dimana pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita saja, melainkan juga keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan, dimana salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pemerataan pendapatan baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Sukirno (1985) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan. Ini mengandung makna bahwa ada tidaknya pembangunan ekonomi pada suatu wilayah pada suatu tahun tertentu tidak hanya dinilai dari peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, melainkan juga perlu diukur adanya perubahan lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, antara lain seperti perkembangan teknologi, infrastruktur, pendidikan, pendapatan masyarakat.

Todaro (2000) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, tanpa mengesampingkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keanekaragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu

maupun kelompok sosial di dalamnya untuk bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakatnya mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 1999). Berangkat dari pengertian tersebut, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, serta kecilnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, antar sektor, maupun antar daerah.

Hal yang terpenting dalam proses pembangunan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengidentifikasi setiap potensi dari sektor ekonomi yang dimiliki untuk kemudian didayagunakan sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, melihat kondisi geografis daerah di Indonesia yang begitu berbeda tentunya mengakibatkan sumberdaya alam yang berbeda pula. Pada akhirnya kondisi ini yang memiliki konsekuensi pada perbedaan pertumbuhan ekonomi yang berbeda, sehingga ada daerah yang lebih makmur dan maju dibandingkan daerah lainnya. Pada keadaan yang demikian ini, diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang tepat agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Pembangunan ekonomi memiliki sifatnya yang kualitatif, menjadikannya sulit untuk diukur. Para ahli ekonomi bersepakat untuk menggunakan pendapatan per kapita masyarakat sebagai alat pengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi dikatakan mengalami kemajuan apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi secara terus-menerus membawa konsekuensi pada perubahan struktur ekonomi. Chenery dalam Tambunan (2001) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi, yang dikenal dengan transformasi struktural, diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi *agregat demand* dan *agregat supply* yang diperlukan

guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi permintaan agregat, perubahan pada struktur ekonomi disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan pada selera yang akan terefleksi pada perubahan pola konsumsinya. Sedangkan dari sisi penawaran agregat, faktor-faktor pendorong utamanya adalah terjadinya perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta penemuan material-material baru untuk produksi.

Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi, yang berarti suatu proses perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Tahapan ini diwujudkan melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor dan kesempatan kerja.

Salah satu faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi adalah sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Dinyatakan dalam Hukum Engels bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian. Sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang industri semakin besar. Transformasi ekonomi ini akan menjadi lebih cepat apabila didukung pula oleh perubahan teknologi, dimana kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas kegiatan ekonomi dan dapat memperluas pasar.

Disadari ataupun tidak, pembangunan ekonomi juga membawa konsekuensi adanya kesenjangan antar wilayah. Thomas dalam Budiharsono (2001:32) menyatakan bahwa bagi sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau seperti Indonesia, perbedaan karakter pada masing-masing wilayah adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Karakteristik wilayah tersebut berdampak pada terciptanya pembangunan ekonomi, sehingga berakibat pada tidak seragamnya pembangunan ekonomi pada setiap wilayah. Ketidakteragaman ini tentunya berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, sehingga menghasilkan wilayah yang pertumbuhannya maju dan wilayah lain yang mengalami

pertumbuhan lambat, meski negara yang bersangkutan telah berusaha menerapkan pola-pola kebijakan pembangunan di wilayahnya guna menghindari kesenjangan dimaksud.

Ketimpangan wilayah merupakan permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan adalah menyelenggarakan pembangunan. Namun pembangunan tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan, bisa jadi justru memperlebar adanya ketimpangan. Ketimpangan erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana terdapat perbedaan nyata antara si kaya dengan si miskin baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bermaksud melihat ketimpangan ekonomi yang terjadi. Karena apabila ketimpangan ekonomi bisa diatasi, maka masalah ketimpangan sosial akan ikut teratasi karena memiliki hubungan selaras dengan masalah perekonomian (Arsyad, 1999).

Berangkat dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi merupakan suatu konsekuensi logis dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah sehingga mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan di pasar, secara normal akan cenderung meningkat (bukannya menurun) yang pada akhirnya meningkatkan kesenjangan atau ketimpangan antara daerah. Sementara itu, kembali pada tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi yang selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus mampu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang dapat memberikan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah ini tidak hanya nampak pada wilayah kecamatan, kabupaten, maupun propinsi di Indonesia. Ketimpangan juga terjadi antar pulau Jawa dan luar Jawa, maupun antar Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah tentu tidak berdiam diri atas kenyataan tersebut, akan tetapi berbagai program yang dikembangkan guna mengatasi ketimpangan tersebut sepertinya belum memberikan hasil yang maksimal.

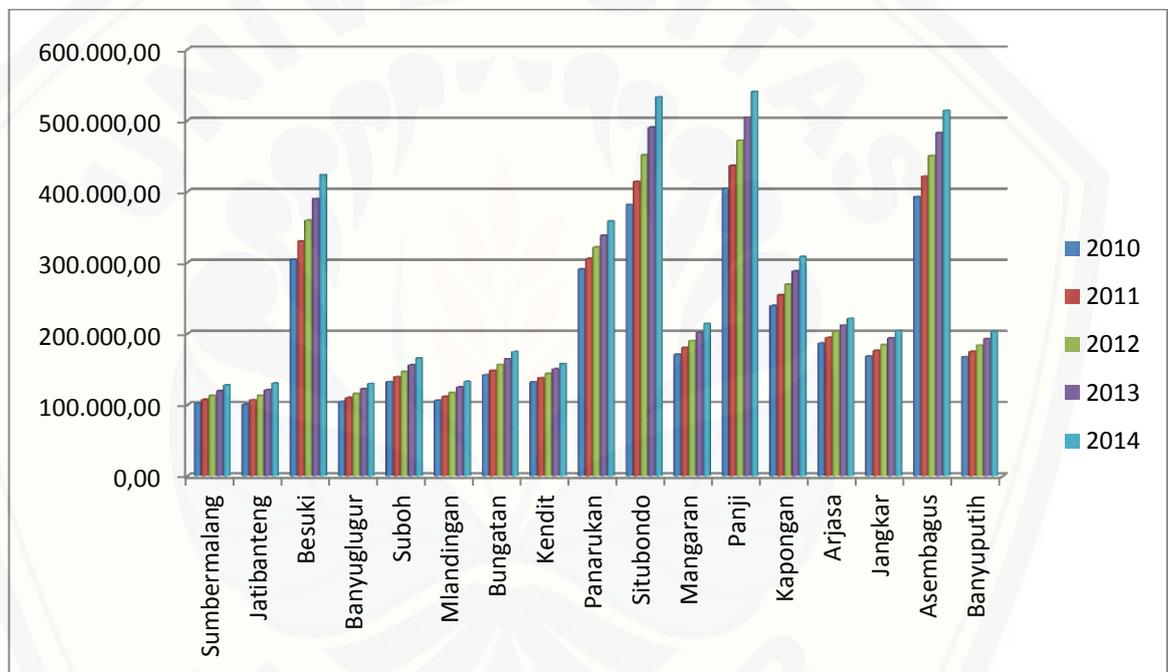
Proses akumulasi dan mobilisasi faktor-faktor produksi, seperti modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan salah satu pemicu dalam pertumbuhan wilayah yang bersangkutan. Beragam karakteristik pada suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Selain itu, Majidi (1997) menyatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi ketimpangan ekonomi nampaknya perlu diperhatikan. Dimana alokasi anggaran harus mengandung strategi untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional.

Kesenjangan spasial akibat pembangunan yang tidak merata seringkali menjadi masalah yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Beberapa penyebab lambatnya pertumbuhan suatu daerah antara lain disebabkan oleh: kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas penunjang yang lengkap. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah kepada daerah (Kuncoro, 2004).

Kabupaten Situbondo, yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur dengan angka kontribusi PDRB rata-rata dibawah 6%, dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas 10% (BPS Jawa Timur, 2013), juga tidak terlepas dari persoalan ketimpangan tersebut. Rendahnya tingkat PDRB Kabupaten

Situbondo tentu berpengaruh pada tingkat pertumbuhan daerah sebab PDRB merupakan instrument untuk mengukur tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga apabila PDRB suatu daerah tinggi maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dikatakan baik sebaliknya apabila PDRB-nya rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan lambat. Secara rinci, PDRB Kabupaten yang disokong oleh 17 (tujuh belas) Kecamatan itu disajikan dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 PDRB Per-Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014 (Jutaan Rupiah)



Sumber: BPS Situbondo dalam Angka, 2010-2014.

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo bertumpu pada 5 Kecamatan dengan PDRB tinggi yakni Panji, Asembagus, Situbondo, Besuki dan Panarukan dibandingkan dengan 12 Kecamatan lain yang memberikan kontribusi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo. Tabel di atas juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antar Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan program Kuota Kecamatan. Kuota Kecamatan ini merupakan program peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan alokasi dana minimal kepada

seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo untuk membiayai program dan kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Alokasi dana minimal yang diterima oleh setiap Kecamatan selanjutnya diperebutkan oleh masing-masing desa pada Kecamatan tersebut melalui program-program unggulan masing-masing desa, antara lain seperti pembangunan jalan poros desa, pembangunan saluran irigasi, pembangunan jembatan penghubung.

Selain program Kuota Kecamatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menjalankan program pemerataan pembangunan melalui Second City yang bertumpu pada Kecamatan Asembagus (wilayah Situbondo Timur) dan Kecamatan Besuki (wilayah Situbondo Barat) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2012. Dengan program dimaksud, diharapkan dapat mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pembangunan, dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah Kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan, serta dapat menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah (Pasal 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2012). Selanjutnya, diharapkan program tersebut dapat memberikan efek-efek pemerataan pertumbuhan di Kecamatan sekitar/Kecamatan penyangga daerah Second City. Akan tetapi, sebagaimana telah tersaji pada data Gambar 1.1, tingginya pertumbuhan ekonomi masih saja terjadi pada daerah sasaran Second City (kecamatan Asembagus dan Besuki), sedangkan daerah penyangga/daerah sekitar Second City masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat.

Sesuai data yang digambarkan dalam Tabel 1.1, tinggi rendahnya PDRB masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo menunjukkan betapa tingginya kesenjangan pertumbuhan ekonomi pada kecamatan di Kabupaten Situbondo. Pembangunan yang cenderung konsentrik pada pusat (wilayah perkotaan) mengakibatkan terjadinya disparitas dalam sektor ekonomi dan infrastruktur. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi akibat perbedaan fungsi

wilayah dan potensi sumber daya alam yang tidak dikelola dengan maksimal. Tingginya pertumbuhan ekonomi masih terdapat pada pusat-pusat daerah sasaran kebijakan Second City. Sedangkan daerah lain yang tidak kalah potensinya, pertumbuhan ekonominya masih cenderung melambat. Contohnya kecamatan Bungatan yang memiliki obyek wisata Pasir Putih, Kecamatan Jangkar yang memiliki Pelabuhan penumpang dan Tempat Penangkapan Ikan, Kecamatan Sumbermalang dengan potensi wisata Rengganisnya.

Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan persoalan serius yang harus segera dicarikan solusinya. Lebih lanjut, kesenjangan ini akan menimbulkan konflik sosial yang apabila dibiarkan terus-menerus tentu mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Guna mengkaji seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Situbondo yang dalam penelitian ini konsentrasinya dibagi ke dalam dua wilayah yaitu Situbondo Timur (yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang tinggi, termasuk wilayah Situbondo Tengah) dan Situbondo Barat (yang memiliki keterlambatan perkembangan ekonomi dan infrastruktur), penelitian ini mengkaji judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Spasial Antar Kecamatan di Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan pembangunan. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa masih saja terdapat perbedaan pada masing-masing daerah, sehingga yang muncul adalah daerah maju dan daerah kurang berkembang. Data PDRB pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 merupakan kondisi ketimpangan spasial di Kabupaten Situbondo.

Perbedaan wilayah dan potensi yang terkandung di dalamnya memang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan antar daerah. Akan tetapi, masing-masing daerah dapat mengupayakan sektor ekonomi potensial yang ada di wilayahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena

itu, untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo, studi ini membahas tentang permasalahan:

- a. Seberapa besar ketimpangan spasial di Kabupaten Situbondo?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas di Kabupaten Situbondo berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan pemerintahan?
- c. Strategi apa yang cocok untuk diterapkan guna mengatasi masalah ketimpangan spasial di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa seberapa besar ketimpangan spasial yang terjadi di Kabupaten Situbondo.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas di Kabupaten Situbondo berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- d. Menganalisa strategi yang cocok untuk diterapkan guna mengatasi masalah ketimpangan spasial di Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut, baik dalam aspek yang sama maupun aspek yang berbeda.
 2. Sebagai penambah khasanah ilmu ekonomi khususnya teori ekonomi pembangunan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya mampu menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi dan sosial
- b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah serta memanfaatkan sektor ekonomi potensial guna meminimalkan ketimpangan di masa mendatang

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak identik dengan pembangunan (*development*), dimana pertumbuhan adalah salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional sedangkan pembangunan berdimensi luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Todaro (2000) menjelaskan lima pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu: teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan, model perubahan structural, revolusi ketergantungan internasional, kontrarevolusi neoklasik dan teori pertumbuhan baru. Model pertumbuhan Harold-Domar atau sering disebut model pertumbuhan AK termasuk dalam teori tahapan linear.

Model Pertumbuhan Neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat standar yaitu:

$$Y = Ae^{ut}K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Dimana Y adalah GNP, K adalah stok kapital dan modal manusia, L adalah tenaga kerja non terampil. A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan e^{ut} melambangkan konstanta kemajuan teknologi. Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GNP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor berikut: kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (melalui pertambahan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), perubahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal dari Solow, dan teori pertumbuhan baru atau teori Endogen oleh Romer maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) kemajuan teknologi.

Salah satu teori perubahan struktural yang paling terkenal adalah Model-Dua-Sektor Lewis yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu: 1) Sektor tradisional, yang menitikberatkan pada sektor pertanian yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas marginal sama dengan nol sehingga menjadikan suatu kondisi yang surplus tenaga kerja (surplus labor); 2) Sektor industri perkotaan modern, yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sektor tradisional.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Aspek ini penting untuk dianalisa guna mengkaji efektivitas kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong aktivitas perekonomian domestik. Pada umumnya, para ekonom memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai kenaikan GNP/GDP saja tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang ada dalam perekonomian. Untuk melihat sektor-sektor yang memberi peranan bagi perkembangan perekonomian daerah, menurut Richardson (2001) dan Glasson (1997) dalam Sukirno, salah satu cara atau pendekatan model ekonomi regional adalah analisis basis ekonomi (*economy base*). Model ini dapat menjelaskan struktur ekonomi daerah atas dua sector, yakni sektor basis dan sektor non basis. Model *economy base* menekankan ekspansi ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian idiologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995).

Peroux dalam Arsyad mengemukakan sebuah teori pusat pertumbuhan (*pole growth*) merupakan teori yang menjadi dasar dari kebijakan pembangunan industry daerah yang banyak terpakai di berbagai negara dewasa ini. Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada saat bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori ini adalah adanya daerah unggulan yang merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya muncul daerah yang relatif maju akan mempengaruhi daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999).

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga akan terlihat peranan dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, sebagaimana yang diperlihatkan PDRB dan sektor-sektornya.

Pola pertumbuhan ekonomi dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan tipologi Klassen (Widodo, 2006) dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Daerah yang maju dan tumbuh cepat.
- b. Daerah maju tapi tertekan.
- c. Daerah berkembang cepat.
- d. Daerah relatif tertinggal.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2009:5) adalah total dari nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Hal ini menunjukkan besarnya nilai tambah dari produksi yang dihasilkan dari berbagai

sektor yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa mementingkan faktor produksi yang dipakai. Cara untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Menghitung dengan menggunakan metode langsung yaitu menggunakan data daerah secara terpisah dengan data nasional sehingga hasil perhitungannya memperhatikan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan wilayah tersebut. Dalam metode langsung, ada 3 pendekatan yang digunakan (BPS, 2009:7-9):

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini, produksi PDRB diperoleh dengan menjumlahkan nilai produk barang dan jasa yang diciptakan oleh semua sektor ekonomi yang dihitung menurut harga faktor-faktor produksi digunakan dalam setiap proses produksi selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Semua perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selain faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung *netto*. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sector disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral.

b. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan ini, produksi PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat di daerah atau wilayah yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang diperoleh sebagai balas jasa atas factor produksi yang disumbangkan atau dijual ke perusahaan. Balas jasa factor produksi dimaksud antara lain upah/gaji (balas jasa factor produksi tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa factor produksi tanah), bunga modal (balas jasa factor produksi wiraswasta atau *skill*).

c. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini, produksi PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan masyarakat untuk membeli barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di daerah yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Berdasarkan tiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep sebaiknya jumlah atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Metode penghitungan tidak langsung dilakukan dengan menghitung pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokasi tertentu. Alokasi yang dapat didasarkan pada nilai bruto atau *netto*, jumlah produksi fisik, jumlah tenaga kerja, penduduk, dengan menggunakan salah satu atau kombinasi. Alokasi ini dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor atau sub sektor. Sedangkan cara penyajian PDRB dapat dilakukan (BPS, 2009:11) sebagai berikut:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
- b. PDRB atas dasar harga konstan, yaitu semua permintaan agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada saat tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga, jadi bukan karena kenaikan harga/inflasi.

Perhitungan PDRB mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk menelaah dan mengetahui struktur atau susunan perekonomian suatu daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, arah perekonomian di masa mendatang serta mampu memberikan kesimpulan yang benar.
- b. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu yang artinya menghitung PDRB dalam suatu jangka waktu yang dicatat. Ini merupakan penjualan barang/jasa dalam angka-angka selama jangka waktu satu tahun. Perbandingan ini memberikan keterangan terjadinya perubahan struktur ekonomi ataupun tidak. Angka perbandingan ini dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan melaksanakan program pembangunan berikutnya.

- c. Membandingkan perekonomian antar daerah. Penghitungan perbandingan ini dapat digunakan Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam menentukan program pembangunan daerah dengan daerah lain. Perhitungan ini penting bagi suatu daerah karena dapat diketahui tingkat kemajuan daerah atau wilayahnya.
- d. Merumuskan kebijakan pemerintah. Penghitungan PDRB dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pertumbuhan yang ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada setiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijakan daerah dan investasi.

2.1.3 Ketimpangan Spasial

Murphy (2000) dalam Iriyanti (2014) menyatakan beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah, yakni:

- a. Faktor geografis, dimana luas dan letak suatu daerah akan mengakibatkan variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumber daya mineral, dan variasi spasial lainnya.
- b. Faktor historis, dimana perkembangan masyarakat, budaya, sistem kelembagaan serta perkembangan ekonomi di masa lalu menjadi penyebab yang penting terutama berkaitan dengan insentif terhadap kapasitas kerja.
- c. Faktor politis, dimana stabilitas suhu politik suatu wilayah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Pada kondisi ini, suhu politik yang tidak stabil mengakibatkan keraguan untuk investasi yang pada akhirnya menghambat perkembangan daerah tersebut.
- d. Faktor kebijakan, dimana kebijakan Pemerintah memberikan pengaruh yang besar terhadap disparitas antar wilayah. Salah satu contohnya, kebijakan pembangunan yang sentralistik mengakibatkan pembangunan terpusat pada daerah tertentu saja, akibatnya terjadi kesenjangan yang luar biasa antar daerah.

- e. Faktor administratif, dimana ketimpangan diakibatkan oleh kapasitas dan kualitas pengelola administrasi/aparat pemerintahnya. Pada kondisi ini, daerah yang memiliki tata kelola administrasi yang baik akan cenderung lebih berkembang.
- f. Faktor sosial, dimana masyarakat yang masih tradisional dengan kepercayaan yang primitif akan lebih sulit berkembang dibanding dengan masyarakat yang memiliki pola pikir modern.
- g. Faktor ekonomi, bahwa ada beberapa faktor ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, yakni:
 1. Perbedaan kuantitas dan kualitas faktor produksi yang dimiliki, seperti tenaga kerja, lahan, infrastruktur, modal.
 2. Terkait akumulasi beberapa faktor, yang antara lain lingkaran kemiskinan, rendahnya tabungan, rendahnya investasi, rendahnya konsumsi, meningkatnya pengangguran, efisiensi rendah.
 3. Kekuatan pasar bebas memberikan ruang pada faktor ekonomi (seperti tenaga kerja, modal dan lahan), serta aktivitas ekonomi (seperti perbankan, asuransi, perdagangan, industri) yang maju dan memberikan hasil besar terkonsentrasi di daerah maju.
 4. Terkait dengan distorsi pasar, spesialisasi tenaga ahli, keterbatasan kemampuan tenaga kerja.

Penelitian ini berfokus pada ketimpangan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Anwar (2005) menyatakan bahwa kesenjangan yang semakin melebar pada akhirnya menimbulkan kerawanan-kerawanan finansial, ekonomi, sosial, politik, yang pada akhirnya melahirkan krisis multidimensional yang sulit diatasi. Ketidakseimbangan pembangunan wilayah/daerah terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya dapat menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Di sisi lain, potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah-wilayah yang kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya.

Menurut Tambunan (2001), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah di Indonesia antaranya adalah:

a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas pembangunan antar daerah. Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih rendah.

Todaro (2000) menambahkan bahwa hubungan antara disparitas dengan pertumbuhan ekonomi yang positif hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan karena terdapat lima alasan, yakni:

1. Disparitas dan kemiskinan yang cukup besar dapat menciptakan kondisi dimana masyarakat miskin tidak dapat memperoleh kredit, tidak dapat membiayai anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih baik, tidak adanya investasi fisik maupun keuangan sehingga anak-anak pada akhirnya menjadi beban bagi negara.
2. Banyak pelaku bisnis, politisi, dan kalangan orang kaya lainnya yang menghabiskan pendapatannya untuk mengimpor barang mewah, rumah mewah, emas, sehingga tidak ada investasi pada sektor produktif lainnya.
3. Masyarakat dengan pendapatan rendah, yang identik dengan pendidikan rendah dan kesehatan rendah tentu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lambat.
4. Peningkatan tingkat pendapatan masyarakat miskin secara keseluruhan akan merangsang permintaan akan produk sehingga menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.
5. Disparitas pendapatan yang cukup lebar akan menjadi disinsentif bagi pembangunan ekonomi.

b. Alokasi investasi

Indikator lain yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kurangnya investasi langsung pada suatu wilayah membuat

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di daerah tersebut menjadi rendah karena tidak adanya sektor industri yang produktif.

c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti upah/gaji dan tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian dari investasi langsung antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Relasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antar daerah dapat dijelaskan dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar tersebut bersifat bebas, mempengaruhi mobilitas atau (re)alokasi faktor produksi antar daerah. Jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada halangan, maka pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik.

d. Perbedaan sumber daya alam antar daerah

Pembangunan ekonomi di daerah yang kaya akan sumberdaya alam akan lebih maju dan masyarakatnya akan lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alamnya.

e. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar daerah, terutama dalam hal jumlah dan pertambahan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting untuk produksi.

f. Kurang lancarnya perdagangan antar wilayah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsure yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan komunikasi dan transportasi. Perdagangan antar daerah yang terjadi biasanya meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, bahan baku, material-material lain untuk produksi dan jasa. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua daerah harus memiliki tingkat perkembangan yang sama, atau mempunyai tingkat industrialisasi yang sama, atau pola ekonomi yang sama, ataupun kebutuhan pembangunan yang sama. Yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan sumbangan interaksi yang saling memperkuat diantara semua daerah yang terlibat (Murphy, 2000 dalam Iryanti, 2014).

2.1.4 Pengembangan Wilayah

Pembangunan merupakan konsep yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia (Syafi'i, 2008). Pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang berada pada kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memandirikan atau memampukan mereka. Proses pembangunan yang dimulai dengan berpijak pada masyarakat pada akhirnya diharapkan mampu memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri (Kartasmita dalam Syafi'i, 2008).

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah bersama masyarakatnya bekerjasama mengelola sumber daya yang ada serta membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004).

Pengembangan wilayah ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa teori, yang antara lain:

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pengembangan ekonomi wilayah, yakni keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mengalami keseimbangan alamiahnya apabila modal dapat mengalir tanpa adanya batasan. Dalam kondisi demikian, modal akan mengalir dari wilayah yang tingkat upahnya tinggi ke wilayah yang tingkat upahnya rendah.

b. Analisis *Shift Share*

Teknik analisis shift share ini menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional, yang ditunjukkan dengan adanya pergeseran hasil pembangunan perekonomian daerah terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional.

c. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan industri lokal akan menggerakkan kekayaan wilayahnya dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai disparitas pendapatan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Syafrizal (1997) melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia bagian barat dengan menggunakan alat analisis Indeks

Williamson. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum angka ketimpangan regional untuk wilayah Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan untuk Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian barat secara relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata di seluruh Indonesia.

Penelitian lainnya adalah Teguh Prayitno (2008) yang berjudul ‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006’. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini PDRB, PDRB perkapita, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, analisis *shift share* dan tipologi Klassen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan berdasarkan indeks Williamson, Kabupaten Kebumen dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan dengan rata-rata 0,385 masih diambang kritis 0,5. Dari proporsional *shift component* (P_j) menunjukkan adanya enam sektor yang tumbuh relatif cepat pada tingkat kecamatan daripada di tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil pengolahan tipologi Klassen terdapat enam kecamatan yang masuk ke tipe IV yaitu daerah dengan pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah. Selengkapnya penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Penelitian berikutnya oleh Widya Puspita Ayu (2008) dengan judul ‘Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004’. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB perkapita, jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dengan alat analisis tipologi Klassen, analisis LQ, *shift share*, indeks Williamson dan indeks *Entropy Theil*. Hasil dari penelitian ini tipologi Klassen membagi per kecamatan menjadi 4 kuadran. Nilai rata-rata indeks Williamson Kabupaten Semarang adalah 0,533, sedangkan nilai rata-rata indeks *Entropy Theil* sebesar 18,344. Diketahui LQ setiap kecamatan di Kabupaten Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sektor industri merupakan sektor basis di empat kecamatan saja, dari 17

kecamatan di Kabupaten Semarang Hasil analisis *shift share* diketahui terdapat 6 sektor yang mempunyai nilai $P_j > 0$ merata di kecamatan Kabupaten Semarang.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Syafrizal (1997)	<i>Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi <p>Alat analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipologi Klassen 2. Indeks Williamson 	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum angka ketimpangan regional untuk wilayah Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan untuk Indonesia secara keseluruhan.
2	Jonathan C. Karay (2003)	<i>Analisis Disparitas Spasial dan Sektoral Studi Kasus di Propinsi Papua</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB perkapita kabupaten 2. Jumlah penduduk 3. Investasi 4. Tabungan 5. ICOR 6. Disparitas 7. Suku bunga <p>Alat analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipologi Klassen 2. LQ 3. Analisis regresi linier berganda 	Menunjukkan bahwa tingkat bunga, ICOR dan suku bunga berpengaruh terhadap disparitas alokasi investasi di Propinsi Papua. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Propinsi Papua, distribusi pengalokasian dana dari Pemerintah Propinsi harus banyak mengarah pada kabupaten yang tertinggal pembangunannya serta perlu adanya stimulasi pada tingkat propinsi melalui penyusunan keselarasan program-program pembangunan antar kabupaten.
3	Budiantoro Hartono (2008)	<i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks ketimpangan pembangunan ekonomi 2. Investasi swasta perkapita 3. Ratio angkatan kerja 4. Alokasi dana bantuan perkapita <p>Alat analisis: Indeks Williamson</p>	Variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu investasi swasta perkapita, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan perkapita sebesar 93,7 persen sedangkan sisanya sebesar 6,3 persen dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.
4	Roziana Ainul Hadi (2008)	<i>Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Gresik</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi <p>Alat analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan indeks Williamson, kabupaten Gresik Tahun 2006-2008 mengalami penurunan di Tahun . 2. Hasil tipologi Klassen menunjukkan Kab. Gresik terbagi menjadi dalam 4 kuadran

			Williamson 2. Shift share 3. Tipologi Klassen	
5	Teguh Prayitno (2008)	<i>Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006</i>	Variabel: 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi Alat analisis: 1. Indeks Williamson 2. Shift share 3. Tipologi Klassen	3. Berdasarkan indeks Williamson, kabupaten Kebumen dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan dengan rata-rata 0,385 masih diambang kritis 0,5. 4. Dari proporsional shift component (Pj) menunjukkan adanya enam sektor yang tumbuh relatif cepat pada tingkat kecamatan dari pada ditingkat kabupaten. 5. Terdapat enam kecamatan (tipe IV)
6	Widya Puspita Ayu (2008)	<i>Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang periode 2000-2004</i>	Variabel: 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi Alat analisis: 1. Tipologi Klassen 2. LQ 3. Shift share 4. Indeks Williamson 5. Indeks Theil	1. Hasil dari Tipologi Klassen membagi per kecamatan menjadi 4 kuadran. 2. Nilai rata-rata indeks Williamson kabupaten Semarang adalah 0,533, sedangkan nilai rata-rata indeks entropy Theil sebesar 18,344. 3. LQ tiap kecamatan di Kabupaten Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sektor industri merupakan sektor basis di empat kecamatan saja, dari 17 kecamatan di Kabupaten Semarang. 4. Hasil Analisis Shift Share diketahui terdapat 6 sektor yang mempunyai nilai $P_j > 0$ merata di kecamatan Kabupaten Semarang.
7	Trias Dewi Yunisti (2012)	<i>Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten</i>	Variabel: 1. PDRB perkapita 2. Indeks pembangunan manusia 3. Tingkat kemiskinan Alat analisis: 1. Indeks Williamson 2. Indeks Theil 3. Tipologi Klassen 4. Pearson Correlation	Adanya perbedaan kondisi dan latar belakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu Pemerintah Provinsi Banten harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
8	Puput Desi Kurnia Sari & Made Kembar Sri Budhi (2013)	<i>Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng</i>	Variabel: 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi Alat analisis: 1. Tipologi Klassen 2. Indeks Williamson 3. Korelasi Pearson	Hasil tipologi kelas hanya terbagi menjadi dua kuadran. Perhitungan indeks willaimson angkanya cukup kecil dan dari hasil analisis yang telah dilakukan hipotesis Kuznets tentang U terbalik tidak berlaku di Kabupaten Buleleng selama periode pengamatan.

			4. Teori Kuznet	
9	Khadafi Rozy & Aditya Wardhono (2013)	<i>Relevansi Perencanaan Pembangunan Jawa Timur Tinjauan Konvergensi dan Disparitas Wilayah</i>	Variabel: 1. PDRB perkapita 2. Jumlah penduduk 3. Laju pertumbuhan ekonomi Alat analisis: 1. Indeks Williamson 2. Analisis Konvergensi 3. Analisis Kausal	Hasil IW Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur 1999-2008 sebesar 0,107.

Sumber : Penelitian Terdahulu.

Penelitian saat ini menganalisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di wilayah kecamatan di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan indeks Williamson, tipologi klasen, Korelasi Pearson dan Teori Kuznets yang bertujuan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo.

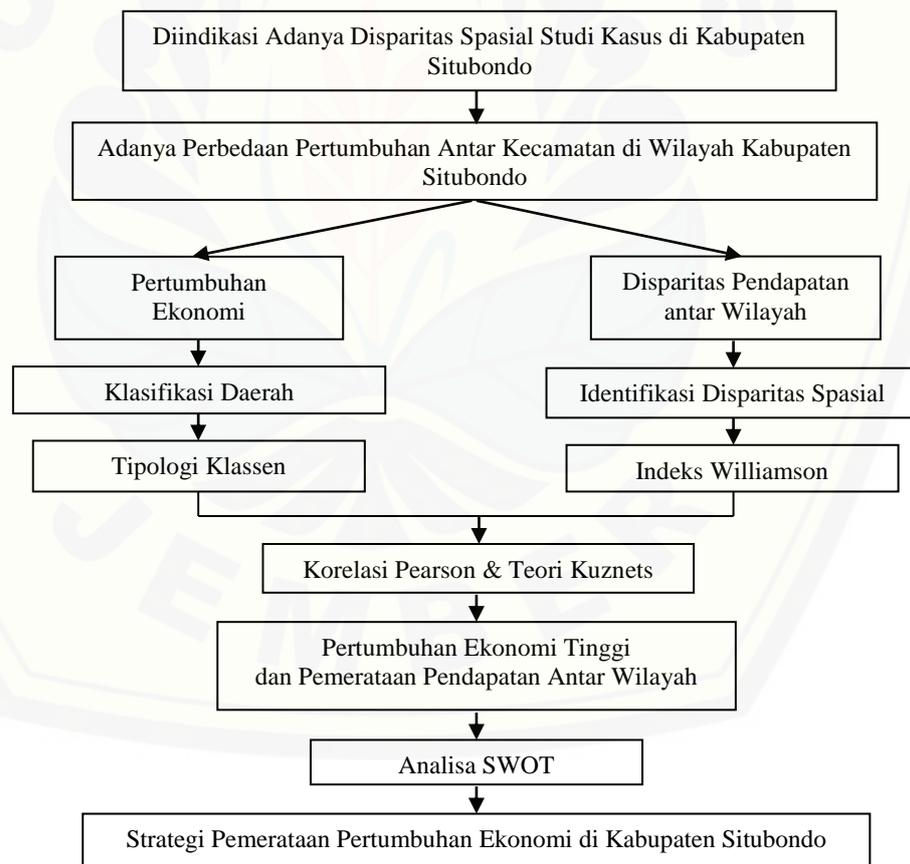
2.3 Kerangka Pemikiran Teori

Setiap daerah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar wilayah satu dengan lainnya yang antara lain disebabkan karena adanya perbedaan potensi pada tiap daerah seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kebijakan Pemerintah. Perbedaan itu selanjutnya mengakibatkan adanya kesenjangan antar wilayah yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya disparitas spasial. Meski hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah, akan tetapi kesenjangan tentu perlu untuk diminimalisir guna menghindari konflik. Oleh karenanya, perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk meminimalkan kesenjangan tersebut.

Ketimpangan wilayah merupakan permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan merupakan persoalan serius yang harus segera dicarikan solusinya. Lebih lanjut, kesenjangan ini akan menimbulkan konflik

sosial yang apabila dibiarkan terus-menerus tentu mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Penelitian ini mengkaji ketimpangan yang disebabkan faktor ekonomi.

Untuk mengukur disparitas pendapatan spasial antar kecamatan di Kabupaten Situbondo selama tahun 2010-2012 digunakan Indeks *Williamson*. Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapitanya, serta mengklasifikasikan sektor-sektor berdasarkan percepatan pertumbuhan dan pangsaanya. Sedangkan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan dan meminimalkan kesenjangan antar Kecamatan dilakukan dengan analisa SWOT. Alur pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah (2015).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teori

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data sekunder tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 17 Kecamatan, yang cenderung konsentrik pada pusat (wilayah perkotaan) yaitu Kecamatan Situbondo, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus. Sementara itu terdapat kecamatan-kecamatan lain yang memiliki kelambatan di dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2010-2014. Data yang digunakan adalah:

- a. PDRB Kabupaten Situbondo ADHK periode tahun 2010-2014.
- b. PDRB per Kecamatan Kabupaten Situbondo ADHK periode tahun 2010-2014.
- c. Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014.
- d. Penduduk Kabupaten/Kota di Kabupaten Situbondo tahun 2010-2014.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Bappeda Kabupaten Situbondo serta instansi terkait lainnya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dioperasionalkan dalam studi ini adalah semua variabel yang akan digunakan dalam rumusan studi. Untuk menghindari adanya multitafsir terhadap variabel yang akan dianalisis, akan diberikan batasan terhadap variabel tersebut:

- a. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita atau PDRB suatu masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang.
- b. Laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai besar kecilnya persentase peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor produksi suatu daerah.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Data PDRB yang digunakan dalam studi ini adalah data PDRB selama tahun 2010 sampai dengan 2014.
- d. Disparitas pendapatan diartikan sebagai ketimpangan dalam mendistribusikan pendapatan kepada kelompok masyarakat di suatu daerah yang didasarkan kepada perhitungan Indeks ketimpangan Williamson.
- e. Struktur ekonomi diartikan sebagai komposisi dari kegiatan produksi secara sektoral menurut lapangan usaha yang mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- f. Daerah dalam studi ini diartikan sebagai daerah secara administrasi pemerintahan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:29) adalah:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB (t)} - \text{PDRB (t-1)}}{\text{PDRB (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRB (t) = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB (t-1) = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

3.5.2 Tipologi Klassen

Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafrizal,1997). Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa penelitian menggunakan analisis ini untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi. Alat ini dipakai guna mendapatkan klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan data yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Formulasi alat analisis dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Tipologi Klassen

PDRB per Kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$(y_1 > y)$	$(y_1 < y)$
$(r_1 > r)$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi (maju dan tumbuh pesat)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi (berkembang cepat tapi tidak maju)
$(r_1 < r)$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah (maju tapi tertekan)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah (relatif tertinggal)

Sumber : Kuncoro (2002).

Keterangan : r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten Situbondo

y : Rata-rata PDRB per kapita kabupaten Situbondo

r : Pertumbuhan ekonomi kecamatan yang diamati (i)

y : PDRB per kapita kecamatan yang diamati (i)

3.5.3 Analisis Tingkat Ketimpangan antar Daerah

Indeks Williamson digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar wilayah. Formula indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk, nilai yang diperoleh antara nol dan satu. Indeks bila mendekati satu berarti memberikan indikator terjadinya ketimpangan regional yang besar dan sebaliknya apabila nilai indeks yang diperoleh mendekati

nol maka berindikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau sangat merata.

Penghitungan dengan Indeks Williamson dinyatakan dalam rumus:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks ketimpangan Williamson

Y_i = Pendapatan perkapita kecamatan di Kabupaten Situbondo

Y = Pendapatan perkapita Kabupaten Situbondo

f_i = Jumlah penduduk di kecamatan di Kabupaten Situbondo

n = Jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo

Indeks ketimpangan Williamson (IW) yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), dimana jika IW mendekati 0 (nol) maka ketimpangan pertumbuhan ekonomi Kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan rendah. Sebaliknya apabila IW mendekati angka 1 (satu) maka tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan tinggi.

3.5.4 Korelasi Pearson

Hasil korelasi pearson dapat dilihat dari nilai signifikansi, bentuk korelasi positif atau negatif, apabila hubungan 2 variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi pearson nilainya kurang atau lebih dari nol (0), apabila menunjukkan tidak adanya korelasi, nilainya adalah nol (0). Nilai korelasi yang positif berarti arah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain adalah satu arah, dengan kata lain apabila, terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB maka peningkatan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan regional (Kuncoro, 2004:110). Hasil dari analisis korelasi pearson ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara Indeks Williamson dengan pendapatan perkapita.

3.5.5 Teori Kuznets tentang U Terbalik

Simon Kusnetz yang mempelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negaranegara maju mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi ini dikenal secara luas sebagai konsep kurva U terbalik, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan akan menurun seiring dengan peningkatan GNP per kapita pada tahap pembangunan selanjutnya. Kemerosotan jangka pendek dalam pertumbuhan pendapatan per kapita sering mengakibatkan ketimpangan yang menajam. Hipotesis Kusnetz (kurva U terbalik) dapat dibuktikan dengan membuat PDRB per kapita dan indeks kesenjangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antar pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson selama periode pengamatan. Kurva U-terbalik menggambarkan kesenjangan distribusi pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap-tahap berikutnya (Kuncoro, 2004:110).

3.5.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Iskandarini, 2004). Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisa SWOT.

Sedangkan menurut Bambang Haffianto (2009) dinyatakan SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman pada suatu organisasi dengan

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal guna penentuan tujuan organisasi. Faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*strength*), merupakan faktor internal yang mendukung organisasi dalam pencapaian tujuannya. Meliputi sumber daya, keahlian atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh karena sumber keuangan, hubungan dan nama baik.
- b. Kelemahan (*weakness*), merupakan faktor internal yang menghambat organisasi dalam pencapaian tujuan. Berupa sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya sumber keuangan atau kemampuan pengelolaan yang tidak baik.
- c. Kesempatan (*opportunity*), merupakan faktor eksternal yang mendukung organisasi dalam pencapaian tujuan. Meliputi perubahan kebijakan, teknologi maupun pola hubungan antar organisasi.
- d. Ancaman (*threat*), merupakan faktor eksternal yang menghambat organisasi dalam pencapaian tujuan. Meliputi perubahan kebijakan, teknologi maupun pola hubungan antar organisasi.

Faktor-faktor tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk matrik di bawah ini yang secara jelas menjelaskan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Analisis SWOT

OT	SW	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		Daftar Kekuatan Internal	Daftar Kelemahan Internal
	Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
	Daftar Peluang Eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang.	Strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang dengan mengatasi kelemahan
	Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
	Daftar Ancaman Eksternal	Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.	Strategi dengan meminumkan kelemahan dan mengkindari ancaman.

Sumber: Iskandarini, 2014.

Keterangan:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Terdapat dua macam pendekatan yang digunakan dalam analisis SWOT, yaitu:

a. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (meliputi peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (meliputi kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 3.3 Matriks SWOT Kearns

	EKSTERNAL	
INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998.

Keterangan:

1. *Comparative Advantages*, merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.
2. *Mobilization*, merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Pada sisi ini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang dimiliki yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
3. *Divestment/investment*, merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur, seperti tersedianya peluang yang cukup namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pada akhirnya organisasi harus menentukan pilihan keputusan untuk diambil yang antara lain melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).
4. *Damage Control*, merupakan kondisi yang paling lemah karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi secara internal dengan ancaman dari luar. Oleh karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi sehingga strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

b. Pendekatan Kuantitatif Matriks SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya.

Perhitungan dalam pendekatan ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau

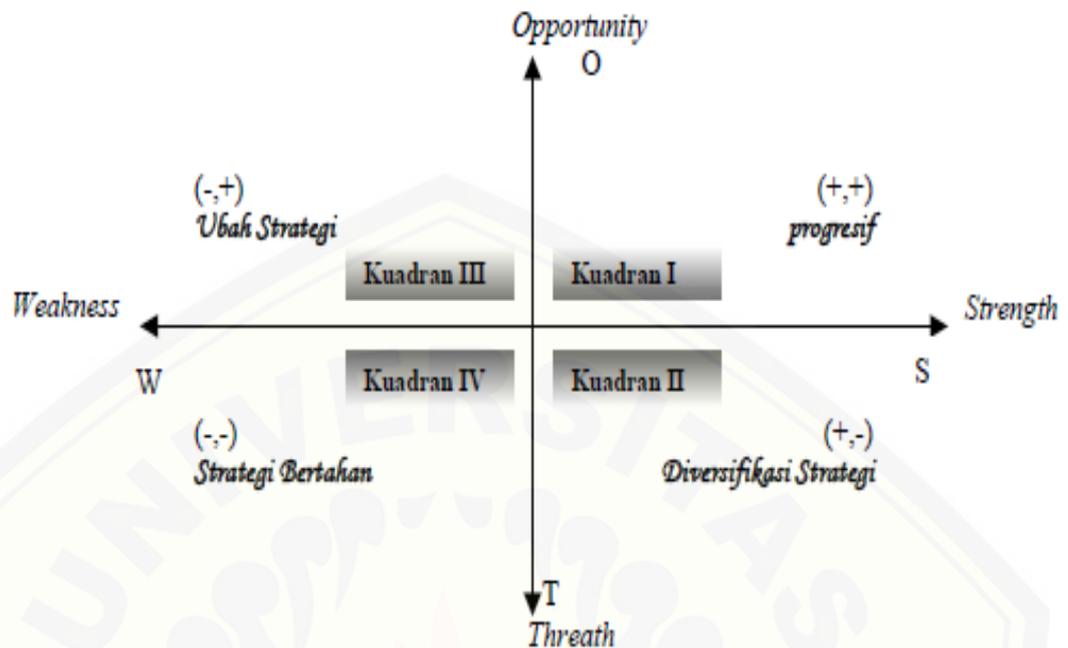
mempengaruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian, namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e). Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.
3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

Tabel 3.4 Pembobotan SWOT

No.	STRENGTH	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.				
2.	dst			
	Total Kekuatan			
No.	WEAKNESS	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.				
2.				
	Total Kelemahan			
Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = x				

No.	OPPORTUNITY	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.				
2.	dst			
	Total Peluang			
No.	TREATH	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.				
2.	dst			
	Total Tantangan			
Selisih Total Peluang – Total Tantangan = O – T = y				



Gambar 3.1 Kuadran Analisa SWOT

Keterangan:

a. Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

b. Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

c. Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

d. Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

prima sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur, memperbesar pertumbuhan di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial sehingga dapat meraih kemajuan secara maksimal. Strategi progresif dalam hal ini dengan memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang .

Berdasarkan pada analisis QSPM strategi yang tepat adalah yang memiliki nilai TAS tertinggi, sehingga prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengatasi permasalahan disparitas spasial antar kecamatan adalah alternatif 3 yaitu strategi pembangunan pada wilayah 3P (pinggiran, perbatasan maupun penyangga). Strategi ini penting mengingat daerah ini relative diabaikan pembangunannya oleh Pemerintah Daerah. Padahal daerah ini merupakan kantong-kantong kemiskinan. Masyarakat di daerah pinggiran pantai maupun pinggiran hutan misalnya, perlu didorong aktivitas ekonominya terutama untuk menunjang sector basis pemerintah. Selain itu juga, perlu diberikan kemudahan akses baik pendidikan, kesehatan maupun akses pelayanan lainnya. Masyarakat di daerah perbatasan perlu juga mendapatkan perhatian agar tidak melakukan aktivitas ekonomi di luar Kabupaten Situbondo. Selanjutnya yang perlu disentuh dalam proses pembangunan adalah daerah penyangga, baik itu penyangga kawasan Second City maupun penyangga kawasan wisata.

Strategi berikutnya adalah strategi pembangunan infrastruktur dan strategi pengembangan potensi basis. Alternatif strategi hasil analisis Matriks QSPM sejalan dengan hasil analisis SWOT yang memfokuskan strateginya dengan memperhatikan pengembangan potensi daerah, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dengan bertumpu pada potensi sector basis di Kabupaten Situbondo yaitu sector pertanian yang meliputi potensi pertanian, perikanan dan peternakan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis tipologi klassen. terdapat lima kecamatan yang dikategorikan wilayah maju atau sekitar 29,41%. Wilayah yang masuk dalam kategori wilayah maju adalah Kecamatan Situbondo, Panji, Kapongan, Asembagus dan Besuki. Pada kategori kedua, yaitu wilayah yang tergolong wilayah maju tapi tertekan adalah Kecamatan Panarukan. Wilayah yang tergolong kecamatan berkembang yang ditunjukkan dengan nilai PDRB kecamatan dibawah PDRB Kabupaten namun memiliki laju pertumbuhan kecamatan diatas laju pertumbuhan Kabupaten adalah Kecamatan Jatibanteng. Sedangkan wilayah yang merupakan kecamatan relatif tertinggal terdapat 10 Kecamatan atau sekitar 58,2%. Kecamatan yang digolongkan kecamatan tertinggal antara lain Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Mangaran, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih.
2. Berdasarkan penghitungan nilai IW menunjukkan bahwa nilai IW pada tahun 2014 yang berada pada nilai > 0.5 antara lain Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Asembagus. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di lima kecamatan tersebut lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan nilai IW terendah berada di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Besuki, Panarukan dan Arjasa dengan nilai masing-masing 0.33, 0.34 dan 0.35. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tiga kecamatan disparitas pendapatannya relatif lebih rendah yang menunjukkan bahwa pada ketiga kecamatan terjadi distribusi pendapatan yang relatif lebih merata dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Situbondo.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas antara lain adalah
 - a. Kekuatan (S): Regulasi mendukung penganggaran yang memihak pada pengurangan disparitas melalui program dana kuota kecamatan, Kebijakan pembangunan *second city*, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan poros desa, dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan UKM kecamatan melalui pengenalan komoditas unggulan kecamatan.
 - b. Kelemahan (W): keterbatasan dana APBD membuat proses pembangunan daerah cenderung lambat sehingga terjadi disparitas spasial Angka kemiskinan penduduk masih tinggi, kondisi geografis Kabupaten yang terletak memanjang sehingga jarak antara kecamatan dengan ibukota Kabupaten cukup jauh, tingkat pendidikan di Kabupaten Situbondo belum didukung adanya sekolah atau universitas bertaraf nasional yang berakreditasi A, dan kondisi social dan kultur masyarakat Kabupaten Situbondo yang sulit menerima hal-hal baru
 - c. Peluang (O): Pembangunan Pelabuhan Panarukan.dari dana APBN, pembangunan Infrastruktur jalan lintas propinsi yang melalui Kabupaten Situbondo dalam kondisi baik, terdapat dua instansi Teknis Kelautan dan Perikanan milik Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai sumber informasi teknologi kelautan dan perikanan, dan pembangunan bandar udara di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, sehingga dapat lebih memperlancar transportasi
 - d. Ancaman (W): kondisi di kabupaten lain yang lebih menarik investor seperti di Kabupaten Banyuwangi Jember, dan Probolinggo, serta Kabupaten Situbondo terletak di kawasan pesisir dengan kondisi perubahan iklim dan cuaca yang tidak mudah diprediksi, seperti kemarau panjang dan banjir
4. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan matriks QSPM, Strategi yang dapat digunakan untuk mengurasi disparitas spasial kecamatan antara lain

strategi pengenalan potensi kecamatan, strategi pengembangan sector ekonomi basis, dan pengembangan infrastruktur yaitu strategi.

5.2 Saran

Adapun saran bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengatasi permasalahan disparitas spasial ini adalah:

- a. Pembangunan berfokus pada daerah tertinggal, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia, dapat berupa pelatihan ketrampilan pada usia produktif atau pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin yang sudah tidak produktif.
- b. Pemberian alokasi dana kuota kecamatan yang lebih besar diutamakan diberikan pada kecamatan-kecamatan tertinggal sehingga penghitungan pemberian anggaran melalui Kuota Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- d. Menciptakan kebijakan yang mendorong peningkatan sector basis masyarakat, seperti pemberdayaan sector perikanan bagi masyarakat pinggir pantai atau pemberdayaan sector pertanian di masyarakat kawasan dataran. Termasuk juga mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM sebagai penyalur hasil pertanian.
- e. Menetapkan regulasi yang mempermudah investasi serta mendukung pemerataan pembangunan. Termasuk juga kebijakan pengembangan potensi wilayah daerah tertinggal dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada pada masing-masing Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan: Tinjauan Kritis*. P4Wpress. Bogor
- Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- . 2004. *Ekonomi Pembangunan: Edisi 4*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2014. *Jawa timur dalam Angka*. Surabaya: BPS Propinsi Jawa timur.
- . 2010-2014. *PDRB Jawa timur*. Surabaya: BPS Propinsi Jawa Timur.
- . 2010-2014. *PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa timur*. Surabaya: BPS Propinsi Jawa timur.
- . 2008-2014. *Situbondo dalam Angka*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi*. Jakarta : LP3ES.
- Glasson, Jhon. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: LPFE UI.
- Haffianto, Bambang. 2009. *Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja PT. samudra Indonesia Ship Management dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard*. Jakarta: <http://lib.ui.ac.id>
- Hartono, Budiantoro. 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Irawan dan Suparmoko. 1981. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Iskandarini. 2004. *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Jhingan, M.L. 2001. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada.

- Karay, Jonathan C. 2003. *Analisis Disparitas Spasial dan Sektoral Studi Kasus di Propinsi Papua*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2001. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2002. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- . 2004. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Majidi, Nasyith. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar daerah. *Prisma, LP3ES No. 3; 3-16*
- Miller dan Mainers, Roger. 1997. *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Iryanti, Rahma. 2014. *Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan tantangan. Paper*. Yogyakarta
- Khadafi, Wardhono, 2013. *Relevansi Perencanaan Pembangunan Jawa Timur Tinjauan Konvergensi dan Disparitas Wilayah*. Jember
- Prayitno, Teguh. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006*. UII. Yogyakarta
- Puspa Ayu, Widya. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004* Jurnal. Semarang
- Rangkuti, Fredy. 2013. *Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson Tarigan, 2003, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2005. *Ekonomi Regional dan Aplikasi: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roziana, 2008. *Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos Vol VI*
- Salihabrur, Ahmad. 2003. *Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1996-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) Volume 5 No.2 Tahun 2003.

- Sari, Puput D.K dan Budhi, Made K.S. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng*. E-Jurnal EP Unud, Vol. 2 No. 3: 164-172.
- Soepomo, Prasetyo. 1993. *Analisis Shift Share: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Surabaya: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.6 No. 1 Hal 37-90.
- Sukirno, Sadono.1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI.
- Suryani, Sri. 2008. *Tujuan Pembangunan Millenium/Millennium Development Goals (MDG's-2015) Paradigma Baru Kerangka Pembangunan Daerah*. [serial on line]. Bimacenter.com.
- Sutarno dan Kuncoro. 2004. *Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Majalah Prisma No 3 Maret 1997*. Yogyakarta: LP3ES.
- Syafi'I, HM. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi daerah, Belajar dari Pengalaman kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 1998-2003 dan 2004-2006*. Averroes Press; Malang.
- Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga: Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yunisti, Trias D. 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten*. Jakarta: Universitas Indonesia.